



Naskah dikirim: 25/08/2026–Selesai revisi: 9/09/2026–Disetujui: 27/09/2026–Diterbitkan: 01/10/2026

Program Edukasi *Civic Culture* Sebagai Upaya Meningkatkan *Civic Knowledge* Siswa

Theodorus Pangalila¹, Brain Fransisco Supit²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

*Email: theopangalila@unima.ac.id

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan pemahaman yang memadai mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara. Salah satu konsep penting dalam pendidikan kewarganegaraan adalah *civic culture*, yaitu budaya kewargaan yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan orientasi warga negara terhadap kehidupan sosial dan demokrasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tomposo, Kabupaten Minahasa, sebagai respons atas masih terbatasnya pemahaman siswa mengenai nilai-nilai *civic culture* dan *civic knowledge*. Kegiatan melibatkan 35 siswa kelas XII dan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, dengan metode edukatif dan partisipatif berupa sosialisasi materi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan refleksi. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* pada empat indikator, yaitu pemahaman konsep *civic culture*, pengetahuan kewarganegaraan, sikap toleransi dan solidaritas sosial, serta kesadaran partisipasi dan tanggung jawab sosial. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan skor rata-rata keseluruhan dari 60,85 (kategori cukup) menjadi 87,58 (kategori sangat baik), atau meningkat sebesar 43,93%. Kegiatan ini terbukti efektif mendorong transformasi orientasi siswa dari budaya politik pasif menuju budaya politik partisipatif, sekaligus menumbuhkan sikap toleransi dan kepedulian sosial yang berakar pada nilai kearifan lokal masyarakat Minahasa.

Kata Kunci: *Civic Culture; Civic Knowledge; Pendidikan Kewarganegaraan; Pengabdian kepada Masyarakat; Siswa SMA*

Abstract

Civic education plays an important role in shaping the young generation to possess national awareness, social responsibility, and an adequate understanding of citizens' rights and obligations. One important concept in civic education is civic culture, referring to the attitudes, values, and orientations of citizens toward social and democratic life. This community service program was conducted at SMA Negeri 1 Tomposo, Minahasa Regency, in response to students' limited understanding of civic culture and civic knowledge. The program involved 35 XII-grade students and was carried out through four stages, namely preparation, implementation, evaluation, and reporting, applying educational and participatory methods that included material socialization, group discussion, case studies, simulation, and reflection. Evaluation used pre-test and post-test measurements across four indicators, namely understanding of civic culture concepts, civic

268



knowledge, tolerance and social solidarity, and awareness of social participation and responsibility. The results showed that the overall average score increased from 60.85 (fair category) to 87.58 (very good category), an increase of 43.93%. The program proved effective in shifting students' orientation from a passive political culture toward a participant political culture, while fostering tolerance and social concern rooted in the local wisdom values of the Minahasa community.

Keywords: Civic Culture; Civic Knowledge; Civic Education; Community Service; High School Students

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, serta kesadaran kewarganegaraan generasi muda (Kusumawati & Putri, 2025). Melalui pendidikan, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Pangalila & Supit, 2024). Dalam konteks kehidupan demokratis, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Sulistyarini et al., 2023).

Salah satu konsep penting dalam kajian kewarganegaraan adalah *civic culture*. Almond dan Verba (1989) dalam karya klasiknya menjelaskan bahwa *civic culture* merupakan pola orientasi politik warga negara yang memungkinkan sistem demokrasi berjalan secara stabil karena adanya kesadaran politik, kepercayaan terhadap institusi sosial dan politik, serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Budaya politik masyarakat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu *parochial culture* yang menunjukkan kesadaran politik sangat rendah, *subject culture* yang menunjukkan masyarakat mengenal sistem politik namun masih bersikap pasif, dan *participant culture* yang menggambarkan masyarakat dengan kesadaran politik tinggi dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. *Civic culture* yang kuat menjadi fondasi penting bagi terbentuknya masyarakat demokratis dan bertanggung jawab (Levada, 2018), dan tetap relevan sebagai kerangka analisis untuk mendorong solidaritas intelektual serta keberdayaan komunitas dalam konteks pendidikan kontemporer (Magill et al., 2024).

Dalam konteks pendidikan, penguatan *civic culture* berkaitan erat dengan *civic knowledge*, yaitu pemahaman siswa mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman kognitif yang kuat terhadap nilai-nilai kewarganegaraan menjadi sarana utama agar siswa mampu bertindak rasional, kritis, dan bijak ketika berhadapan dengan isu publik di masyarakat (Sulistyarini et al., 2023). Selain itu, *civic culture* juga mencakup dimensi sosial seperti partisipasi sosial, solidaritas, toleransi, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama, yang akan lebih berhasil ditanamkan apabila diintegrasikan dengan nilai-nilai sosial budaya lokal yang dihidupi oleh masyarakat setempat (Masyitoh & Maesaroh, 2022).

Namun demikian, dalam praktik pendidikan di sekolah masih ditemukan berbagai tantangan dalam penguatan *civic culture* dan *civic knowledge* siswa. Kondisi ini juga

ditemukan pada siswa di SMA Negeri 1 Tomposo, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, yang menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak sekolah, ditemukan dua permasalahan prioritas. Pertama, sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai nilai-nilai kewarganegaraan yang berkaitan dengan sikap toleransi, tanggung jawab sebagai warga negara, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Kedua, meskipun pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional, kegiatan yang secara khusus bersifat edukatif dan partisipatif untuk memperkuat *civic culture* dalam kehidupan sekolah masih terbatas, sehingga penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari siswa belum sepenuhnya optimal.

Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian sejenis di lingkungan pendidikan tinggi yang menunjukkan bahwa penguatan literasi dan kesadaran kewarganegaraan generasi muda melalui program pembekalan maupun pelatihan partisipatif memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan karakter dan literasi kewarganegaraan peserta (Anggawirya et al., 2023; Jati & Efendi, 2025). Model pendidikan kewarganegaraan berbasis *civic* masyarakat juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan dan komunitas mampu memperkuat kompetensi kewarganegaraan sekaligus memberdayakan masyarakat sasaran (Nanggala, 2025).

Kontribusi mendasar dari kegiatan PKM ini adalah memberikan penguatan *civic culture* kepada siswa SMA sebagai generasi muda yang akan menjadi warga negara aktif dan bertanggung jawab di masa depan. Dalam situasi sosial saat ini, munculnya berbagai tantangan seperti meningkatnya sikap intoleransi, kurangnya kepedulian sosial, serta rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih kuat. Melalui kegiatan penguatan *civic culture* ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, meningkatnya *civic knowledge*, serta mampu mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kegiatan ini turut membantu membentuk generasi muda yang memiliki karakter kewarganegaraan kuat dan mampu menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PKM ini dirancang dalam bentuk program edukasi penguatan *civic culture* bagi siswa SMA Negeri 1 Tomposo dengan tujuan: (1) meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai-nilai *civic culture*; (2) meningkatkan *civic knowledge* siswa sebagai warga negara muda; dan (3) mendorong terbentuknya sikap kewargaan yang partisipatif, toleran, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat sekolah menengah.

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tomposo, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan sasaran peserta sebanyak 35 orang siswa kelas XII. Mitra dalam kegiatan ini melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa. Pihak sekolah berperan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui penyediaan tempat, koordinasi peserta, dan dukungan pelaksanaan program, sedangkan siswa berperan sebagai peserta sekaligus mitra utama yang mengikuti rangkaian kegiatan edukasi dan pelatihan penguatan *civic culture*. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif serta partisipatif melalui empat tahapan berikut.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan kepala sekolah dan guru mengenai rencana pelaksanaan kegiatan, penentuan peserta, penyusunan materi edukasi mengenai *civic culture* dan *civic knowledge*, serta penyiapan sarana dan prasarana seperti media presentasi, bahan pelatihan, instrumen evaluasi, dan alat dokumentasi kegiatan.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui lima sesi yang berkesinambungan. Sesi pertama adalah pelaksanaan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal (*baseline*) peserta mengenai konsep dasar kewarganegaraan, prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta orientasi mereka terhadap *civic culture*. Sesi kedua berupa penyampaian materi *civic knowledge* yang difokuskan pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi negara, mekanisme demokrasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, disampaikan melalui presentasi visual, video edukatif, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan remaja sehari-hari. Sesi ketiga berupa internalisasi nilai *civic culture*, dengan mengelaborasi konsep transisi budaya politik pasif (*subject/parochial*) menuju budaya politik partisipatif (*participant culture*) sebagaimana dikemukakan Almond dan Verba (1989), serta menekankan dimensi sosial *civic culture* seperti gotong royong, toleransi, solidaritas sosial, dan tanggung jawab menjaga ketertiban lingkungan sekolah dan masyarakat lokal Tomposo. Sesi keempat berupa diskusi kelompok, simulasi, dan refleksi interaktif, dengan 35 siswa dibagi menjadi lima kelompok yang masing-masing beranggotakan tujuh siswa. Setiap kelompok diberikan studi kasus (*case-based study*) mengenai dilema kewargaan, seperti perundungan di sekolah, rendahnya kesadaran menjaga fasilitas umum, perbedaan pendapat dalam organisasi sekolah, dan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang kemudian didiskusikan dan dipresentasikan antarkelompok disertai sesi tanggapan dan refleksi bersama. Sesi kelima adalah pelaksanaan *post-test* dengan indikator soal yang setara dengan *pre-test*, bertujuan mengukur peningkatan capaian pengetahuan setelah menerima perlakuan (*treatment*) berupa program edukasi dan pelatihan.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* pada empat indikator, yaitu (A) pemahaman konsep *civic culture* dan budaya politik partisipatif; (B) *civic knowledge* terkait hak, kewajiban, dan nilai demokrasi; (C) sikap toleransi, solidaritas, dan

penghargaan terhadap keragaman sosial; serta (D) kesadaran partisipasi dan tanggung jawab sosial. Penilaian menggunakan skala 0-100 dan dianalisis secara kuantitatif deskriptif, dilengkapi dengan diskusi dan refleksi bersama siswa mengenai manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan meliputi penyusunan laporan kegiatan PKM, penyusunan artikel ilmiah untuk publikasi pada jurnal, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan program.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan

Kegiatan PKM dengan fokus penguatan *civic culture* dan *civic knowledge* telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tompaso dengan melibatkan 35 siswa sebagai peserta. Program berjalan secara sistematis sesuai rancangan metode, dimulai dari sesi pembukaan dan pre-test, dua sesi edukasi (*civic knowledge* dan *civic culture*), sesi diskusi kelompok dan simulasi berbasis studi kasus, hingga sesi post-test sebagai evaluasi akhir.

Pada sesi pembukaan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan menyampaikan arahan singkat mengenai latar belakang serta tujuan kegiatan. Sebelum materi edukatif diberikan, seluruh peserta diminta mengisi instrumen *pre-test* yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan awal (*baseline*) mengenai konsep dasar kewarganegaraan, prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pemahaman dan orientasi mereka terhadap *civic culture*.

Pada sesi edukasi pertama, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai *civic knowledge* yang difokuskan pada penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, konstitusi negara, mekanisme demokrasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban warga negara. Metode penyampaian materi menggunakan kombinasi presentasi visual, penayangan video edukatif singkat, dan pemaparan studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan remaja sehari-hari. Pada sesi edukasi kedua, materi difokuskan pada penanaman konsep *civic culture*, dengan mengelaborasi konsep budaya politik menurut Almond dan Verba (1989), yakni pentingnya transisi dari budaya politik pasif (*subject/parochial*) menuju budaya politik partisipatif (*participant culture*), disertai penekanan pada dimensi sosial *civic culture* seperti semangat gotong royong, toleransi antarwarga, solidaritas sosial, serta tanggung jawab menjaga ketertiban lingkungan sekolah dan masyarakat lokal Tompaso.

Untuk memindahkan pengetahuan dari ranah teoretis ke ranah aplikatif, 35 siswa dibagi menjadi lima kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan tujuh siswa. Setiap kelompok diberikan studi kasus (*case-based study*) terkait dilema kewargaan, seperti tindak perundungan (*bullying*) di sekolah, rendahnya kesadaran menjaga fasilitas umum, perbedaan pendapat dalam organisasi sekolah, serta partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Para siswa diminta mendiskusikan solusi berbasis nilai *civic culture*,

kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelompok lain yang dilanjutkan dengan sesi tanggapan dan refleksi bersama. Sebagai tahap penutup evaluasi kuantitatif, seluruh peserta kembali mengisi instrumen *post-test* dengan indikator soal yang setara dengan *pre-test*, guna mengukur peningkatan capaian pengetahuan dan pergeseran pemahaman siswa setelah menerima perlakuan (*treatment*) berupa program edukasi dan pelatihan. Data hasil *pre-test* dan *post-test* dari 35 siswa dianalisis secara kuantitatif deskriptif pada empat indikator penilaian. Hasil rekapitulasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Siswa SMA Negeri 1 Tompaso (N = 35)

No	Indikator Penilaian	Rata-Rata Pre-test	Rata-Rata Post-test	Selisih	Peningkatan (%)	Kategori Akhir
1	Pemahaman Konsep <i>Civic Culture</i> & Budaya Politik Partisipatif Pengetahuan	56,8	85,2	+28,4	50,0%	Sangat Baik
2	Kewarganegaraan (<i>Civic Knowledge</i>)	61,4	88,6	+27,2	44,3%	Sangat Baik
3	Sikap Toleransi dan Solidaritas Sosial	65,2	90,1	+24,9	38,2%	Sangat Baik
4	Kesadaran Partisipasi & Tanggung Jawab Sosial	60,0	86,4	+26,4	44,0%	Sangat Baik
	Rata-Rata Keseluruhan	60,85	87,58	+26,73	43,93%	Sangat Baik

Sumber: data diolah oleh penulis, 2026.

Berdasarkan data pada Tabel 1, secara umum terjadi peningkatan rata-rata capaian pemahaman siswa dari 60,85 pada saat *pre-test* (kategori cukup) menjadi 87,58 pada saat *post-test* (kategori sangat baik), atau meningkat sebesar 43,93% dengan kenaikan skor absolut sebesar 26,73 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman konsep *civic culture* dan budaya politik partisipatif, yaitu sebesar 50,0%, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada indikator sikap toleransi dan solidaritas sosial, yaitu sebesar 38,2%. Meskipun demikian, keempat indikator tetap berada pada kategori sangat baik pada saat *post-test*.

Pembahasan

Peningkatan Civic Knowledge sebagai Dasar Pembentukan Karakter Warga Negara

Pada pengukuran awal, rata-rata skor *civic knowledge* siswa berada pada angka 61,4, yang menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan siswa masih terbatas pada hafalan materi tekstual kurikuler. Siswa umumnya mengetahui bentuk hak dan kewajiban secara umum, namun belum memahami secara mendalam implikasi praktis dari nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, dan kedaulatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti sesi edukasi interaktif, terjadi peningkatan sebesar 44,3% dengan skor akhir

mencapai 88,6. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian materi yang dikemas secara kontekstual dan komunikatif efektif meningkatkan daya serap siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Sulistyarini et al. (2023) bahwa pemahaman kognitif yang kuat terhadap nilai-nilai kewarganegaraan menjadi sarana utama agar siswa mampu bertindak rasional, kritis, dan bijak dalam menghadapi isu publik, sebab tanpa *civic knowledge* yang memadai, sikap kewargaan (*civic disposition*) dan keterampilan kewargaan (*civic skills*) tidak akan terbangun secara optimal.

Transformasi Orientasi Civic Culture: dari Budaya Pasif menuju Participant Culture

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah pergeseran orientasi budaya politik dan kesadaran sosial siswa. Merujuk pada Almond dan Verba (1989), sebelum kegiatan dilaksanakan sebagian besar siswa cenderung berada pada tipe budaya subject atau bahkan *parochial*, yaitu menyadari keberadaan aturan dan struktur pemerintahan atau sekolah, namun menganggap bahwa urusan publik dan partisipasi sosial merupakan kewajiban pihak dewasa atau pemerintah semata. Intervensi pelatihan yang mengintegrasikan simulasi studi kasus berhasil mendorong pemahaman konsep *civic culture* meningkat sebesar 50,0%, dari skor rata-rata 56,8 menjadi 85,2. Melalui diskusi kelompok, siswa mulai menyadari pentingnya participant culture, di mana generasi muda tidak lagi berposisi sebagai penonton pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang berani menyampaikan aspirasi secara santun, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama, dan bertanggung jawab atas kemajuan lingkungan sekitar. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa *civic culture* berperan sebagai fondasi solidaritas intelektual dan keberdayaan komunitas dalam konteks pendidikan kontemporer (Magill et al., 2024).

Penanaman Nilai Toleransi, Solidaritas, dan Kepedulian Sosial Berbasis Kearifan Lokal

Penguatan *civic culture* tidak hanya bertumpu pada ranah politik formal, tetapi juga mencakup dimensi budaya sosial. Pada indikator sikap toleransi dan solidaritas sosial, terjadi peningkatan skor dari 65,2 menjadi 90,1. Peningkatan ini relevan mengingat masyarakat Tompaso dan Sulawesi Utara pada umumnya memiliki modal sosial berbasis kearifan lokal yang kuat, seperti semangat gotong royong dan kekeluargaan yang dikenal luas dalam tradisi Mapalus (Rumbay et al., 2022). Dalam sesi refleksi, siswa diajak mengaitkan nilai *civic culture* nasional dengan nilai kearifan lokal tersebut, dan mampu mengartikulasikan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, mencegah perilaku diskriminatif, serta menumbuhkan solidaritas antarsesama tanpa membedakan latar belakang. Temuan ini memperkuat pandangan Masyitoh dan Maesaroh (2022) bahwa penguatan *civic culture* pada siswa akan lebih berhasil apabila diintegrasikan dengan nilai sosial budaya lokal yang dihidupi masyarakat setempat, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian mengenai peran nilai budaya lokal Sulawesi Utara dalam pendidikan toleransi (Pangalila & Mantiri, 2020).

Implikasi Praktis dan Strategi Keberlanjutan

Ketercapaian target luaran kegiatan memberikan dampak positif bagi mitra. Permasalahan utama mitra, yaitu terbatasnya ruang edukasi partisipatif dan belum optimalnya

pemahaman siswa mengenai *civic culture*, dapat diatasi melalui penyelenggaraan program ini. Antusiasme dan keaktifan siswa selama pembelajaran interaktif menunjukkan bahwa metode partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan refleksi jauh lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah, sejalan dengan temuan pada berbagai kegiatan pengabdian sejenis yang menunjukkan bahwa pembekalan berbasis pelatihan partisipatif efektif memperkuat karakter dan literasi kewarganegaraan generasi muda (Anggawirya et al., 2023; Jati & Efendi, 2025). Model kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas sekolah dalam bentuk kegiatan PKM semacam ini juga sejalan dengan gagasan model pendidikan kewarganegaraan berbasis civic masyarakat yang memadukan penguatan kompetensi kewarganegaraan dengan pemberdayaan komunitas sasaran (Nanggala, 2025).

Secara khusus, antusiasme 35 siswa selama proses pembelajaran interaktif juga menunjukkan bahwa keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi wahana pembentukan karakter kewargaan yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial satu kali. Implikasi jangka panjang dari kegiatan ini adalah terbentuknya karakter kewargaan siswa yang lebih toleran, bertanggung jawab, dan siap berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kesiswaan, seperti OSIS, pramuka, maupun kegiatan bakti sosial kemasyarakatan di lingkungan sekolah dan masyarakat Tompaso.

Sebagai bentuk keberlanjutan, tim pengabdi merekomendasikan kepada pihak sekolah dan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Tompaso untuk terus mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dan studi kasus nyata dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, sehingga penguatan civic culture dan civic knowledge tidak berhenti saat program PKM berakhir, melainkan dapat melembaga menjadi budaya sekolah (*school culture*) yang positif secara berkelanjutan.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan PKM mengenai penguatan *civic culture* dan *civic knowledge* bagi 35 siswa di SMA Negeri 1 Tompaso, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi materi, diskusi kelompok, dan simulasi terbukti efektif meningkatkan pemahaman kewarganegaraan siswa, ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata nilai keseluruhan sebesar 43,93%, dari skor rata-rata *pre-test* 60,85 (kategori cukup) menjadi 87,58 (kategori sangat baik) pada *post-test*. Kedua, program ini berhasil mendorong pergeseran orientasi siswa dari budaya kewargaan yang pasif (*subject culture*) menuju budaya politik dan sosial yang partisipatif (*participant culture*), ditandai dengan tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab sosial, nilai toleransi, dan semangat keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan sekolah. Ketiga, metode pembelajaran interaktif yang memadukan sosialisasi materi dengan studi kasus berbasis dilema kewargaan lokal terbukti lebih menumbuhkan

antusiasme siswa dibandingkan metode ceramah satu arah, sekaligus mempermudah pemahaman konsep kewarganegaraan yang sebelumnya dianggap abstrak.

Sebagai tindak lanjut, disarankan kepada pihak sekolah untuk terus menerapkan metode pembelajaran berbasis masalah dan diskusi studi kasus dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta menyediakan wadah kegiatan kesiswaan yang berorientasi pada penguatan nilai *civic culture*. Bagi tim pengabdian atau peneliti selanjutnya, kegiatan serupa dapat direplikasi pada sekolah lain di wilayah Kabupaten Minahasa dengan cakupan sasaran yang lebih luas, disertai evaluasi berkala (*follow-up*) untuk mengukur retensi pemahaman dan penerapan nilai *civic culture* dalam perilaku kewargaan siswa secara nyata.

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado atas dukungan pendanaan melalui skema Dana PNBPN UNIMA Tahun Anggaran 2026, serta kepada kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Negeri 1 Tompaso atas kerja sama dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Sage Publications.
- Anggawirya, A. M., Floriani, R., Sijabat, S., Istiqomah, N., Giovani, E., & Hanip, R. (2023). Peningkatan literasi kewarganegaraan dan kesadaran multikulturalisme pada masyarakat Papua Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (JERKIN)*, 2(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.207>
- Jati, D. H. P., & Efendi, M. (2025). Pembekalan civic with society sebagai penguatan karakter dan literasi kewarganegaraan bagi mahasiswa. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 237–246. <https://doi.org/10.24246/jms.v5i32025p237-246>
- Kusumawati, I., & Putri, P. O. (2025). Pelatihan Peningkatan Keterampilan Matematika dan Etika Kewarganegaraan dalam Mempersiapkan Lulusan Sarjana. *Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 35-45.
- Levada, Y. A. (2018). *Civic culture. Dalam Russian culture at the crossroads* (hlm. 299–312). Routledge.
- Magill, K. R., Scholten, N., Blevins, B., & Smith, V. D. (2024). The importance of civic culture: Toward intellectual solidarity and community agency. *Education, Citizenship and Social Justice*, 19(1), 139–161. <https://doi.org/10.1177/17461979221126612>
- Masyitoh, I. S., & Maesaroh, S. (2022). Transforming the local wisdom values of the Cireundeu indigenous peoples in enhancing civic culture. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC)*, 548–553.

- Nanggala, A. (2025). A community civic-based civic education model to strengthen students' civic competence and empower communities. *Tekmulogi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 195–204. <https://doi.org/10.17509/tmg.v5i2.90419>
- Pangalila, T., & Mantiri, J. (2020). Nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara sebagai model pendidikan toleransi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.21009/jimd.v20i01.15924>
- Pangalila, T., & Supit, B. F. (2024). Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Siswa di SMP Negeri 4 Tomohon. *Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 74–82.
- Rumbay, C. A., Lumapow, H., Tuerah, P. E. A., Usoh, E. J., Rotty, V. N. J., & Lengkong, J. S. J. (2022). Embracing Mapalus traditional management values for Christian religious education. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), 1–9.
- Sulistyarini, S., Dewantara, J. A., & Adha, M. M. (2023). Civic education and citizenship studies in culture, identity, and art. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(1), 1–5.